

AKREDITASI SEBAGAI STANDAR MUTU;
Pengalaman dan Pengamatan
Oleh: Lasa Hs

Abstrak

Sesuatu dianggap mutu apabila barang/jasa itu sesuai yang dijanjikan, sesuai harapan, sesuai permintaan, atau sesuai standar. Maka penghasil produk harus menyesuaikan.

Perpustakaan sebagai lembaga jasa perlu menyesuaikan diri dengan standar mutu tersebut. Salah satu ukuran mutu adalah sesuai standar. Maka diperlukan standar mutu yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Banyak standar mutu perpustakaan yang ditawarkan di negeri ini. Standar itu antara lain Standar Nasional Indonesia/SNI, Standar Nasional Perpustakaan/SNP, Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi, UU No. 43 Tahun 2007, dan lainnya. Standar-standar tersebut kadang sekedar wacana dan jarang diaplikasikan.

Akreditasi perpustakaan merupakan salah satu bentuk pengukuran mutu perpustakaan yang berlaku nasional. Pengukuran ini dievaluasi dari 9 (sembilan) komponen atau lebih. Komponen penilaian perpustakaan sekolah terdiri dari 9 komponen. Yakni layanan, kerjasama, koleksi, pengorganisasian bahan pustaka, sumber daya manusia, gedung/tata ruang, anggaran, manajemen, perawatan koleksi.

Kata kunci: Akreditasi. Perpustakaan Sekolah. Kualitas Perpustakaan. Standardisasi

Latar Belakang

Perlu adanya akreditasi didasarkan pada pemikiran dan realita:

1. Terdapat beberapa standar perpustakaan yang belum/tidak diaplikasikan

Dalam dunia kepastakawanan terdapat beberapa standar perpustakaan (sekolah, perguruan tinggi, daerah, umum, dll) seperti SNI, SNP, ISO, Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi, FPPTI dll. Standar-standar ini tidak/belum diimplementasikan. Hal ini terjadi kemungkinan adanya pemahaman bahwa standar-standar tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penilaian. Bahkan bisa muncul pendapat bahwa tidak ada pengaruh sama sekali

2. Mutu perpustakaan kadang dilihat dari fisik.

Penilaian baik buruk, mutu tidak suatu produk (barang & jasa) kadang dari fisik. Perpustakaan dikatakan hebat karena gedungnya, koleksi, mebuler, kenyamanan. Bisa juga perpustakaan dikatakan baik karena menggunakan teknologi terbaru. Penilaian satu sisi ini jelas bukan penilaian komprehensif. Artinya penilaian itu tidak secara utuh.

3. Lembaga atau perpustakaan negeri dianggap lebih bermutu dari lembaga atau perpustakaan swasta.

Masyarakat masih beranggapan bahwa kalau lembaga (perguruan tinggi, sekolah, perpustakaan) milik pemerintah itu pasti baik dan berkualitas. Bahkan ada anggapan bahwa produk luar negeri pasti bagus. Padahal realita tidak demikian.

Sekedar contoh di DIY terdapat 10 (sepuluh) perpustakaan PT milik Pemerintah (UGM, UIN, UNY, UPN, STPN, Poltekes, ATK, AAU, ISI, Politeknik Seni) . Diantara perpustakaan PTN itu yang terakreditasi A baru 5 perpustakaan (50 %) (ISI, Politeknik Seni, UGM, UIN, STPN). Sementara itu di DIY terdapat 3 (tiga) Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (UMY, UAD, UNISA) semuanya (100 %) terakreditasi A. Begitu juga dengan akreditasi institusi maupun prodi. Ternyata di PTN DIY masih ada prodinya yang berakreditasi C. Sedangkan UMY (swasta) memiliki 35 prodi dengan akreditasi A sebanyak 20 prodi, dan 15 prodi terakreditasi B, dan tidak ada satupun prodi yang terakreditasi C (2017)

Dengan adanya akreditasi, masyarakat bisa menilai bahwa lembaga swasta belum tentu kurang/tidak bermutu. Sebaliknya, mereka akan terbuka bahwa perpustakaan milik lembaga Pemerintah itu belum tentu baik.

4. Alat ukur mutu seharusnya berlaku nasional & internasional

Beberapa waktu lalu terdapat beberapa lembaga (perpustakaan) melakukan pengukuran dengan standar (perencanaan, persiapan, dan pengukuran) yang dibuat sendiri. Dengan cara ini tentu hasilnya akan bagus karena tidak ada pembandingnya. Oleh karena itu diperlukan standar nasional & internasional yang berlaku sama pada semua lembaga (perpustakaan)

5. Untuk mengetahui mutu/tidaknya perpustakaan perlu penilaian obyektif oleh lembaga kredibel.

Penilaian yang dilakukan internal kadang kurang obyektif. Sering muncul pertimbangan tertentu untuk menaikkan citra lembaga. Bahkan cenderung ada rekayasa penilaian. Untuk itu perlu ada sistem penilaian oleh lembaga luar yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina perpustakaan seluruh Indonesia. Maka lembaga ini mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menilai berbagai jenis perpustakaan seluruh Indonesia.

Tujuan

Perlunya standardisasi lembaga maupun profesi yang berupa akreditasi (lembaga) dan sertifikasi (profesi) dengan tujuan:

1. Mencapai mutu tertentu

Dengan adanya akreditasi akan diketahui capaian mutu perpustakaan. Apakah mutunya sangat baik (A), baik (B), cukup (C), atau tidak terakreditasi (belum mutu). Dalam pengertian ekstrim, maka perpustakaan yang belum terakreditasi berarti belum mutu. Apa buktinya mutu.

2. Memacu kemajuan perpustakaan

Dari pengalaman lapangan, diketahui bahwa dengan adanya akreditasi akan memacu perpustakaan untuk maju. Usaha untuk maju ini dibenahi dari segi manajemen, SDM, kepemimpinan, koleksi, tata ruang, sarana prasarana, anggaran. Jadi akreditasi bukan sekedar mencari nilai

3. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan

Dengan adanya bimbingan lapangan akan membawa pengaruh terhadap pengolahan, penyimpanan, dan layanan. Hal ini dapat dimaklumi, bahwa sebagian besar tenaga perpustakaan sekolah kurang memiliki kompetensi di bidangnya. Kasus ini ditemukan di beberapa perpustakaan sekolah DIY bahkan perpustakaan kabupaten.

4. Mendukung eksistensi lembaga induk

Mutu perpustakaan memengaruhi kinerja lembaga induknya. Hal ini sangat terasa di swasta. Bahkan dalam akreditasi institusi dan prodi oleh BAN PT, mutu perpustakaan PT berpengaruh signifikan terhadap nilai akreditasi.

Makna akreditasi

1. Penilaian **mutu** dari berbagai aspek.

Penilaian mutu dalam akreditasi dilihat dari beberapa aspek (untuk perpustakaan sekolah ada 9 aspek) yakni; pelayanan, manajemen, anggaran, kerjasama, pelestarian, kepemimpinan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengolahan). Dengan demikian penilaian tidak dari fisik saja.

2. Indikator kemajuan

Perpustakaan yang sudah terakreditasi berarti telah menunjukkan kemajuan sampai titik tertentu. Perpustakaan ini jelas lebih maju dari perpustakaan yang belum/tidak terakreditasi. Perpustakaan yang merasa modern dan lengkap boleh saja mengaku perpustakannya sudah maju. Namun indikator/alat ukur kemajuan itu apa. Hal ini memang terjadi di DIY.

3. Menjadi perpustakaan pembina.

Perpustakaan yang sudah terakreditasi A diharapkan menjadi acuan pengembangan perpustakaan sekurang-kurangnya di komunitasnya. Syukur bisa menjadi pembina perpustakaan komunitasnya. Sekedar contoh adalah Perpustakaan UMY kini memosisikan diri sebagai pembina perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah- 'Aisyiyah/PTMA se Indonesia lantaran memiliki beberapa kemampuan. Demikian pula dengan Perpustakaan UNISA Yogyakarta. Sesuai kapasitas dan kemampuannya, Perpustakaan UNISA diposisikan sebagai pembina perpustakaan PTMA DIY dan Jawa Tengah Bagian Selatan. Sementara itu Perpustakaan UMS membina perpustakaan PTMA Jawa Tengah bagian Utara. Perpustakaan UM Malang menjadi pembina perpustakaan PTMA Jawa Timur, Madura, dan NTB, NTT.

Secara lokal diantara ketiga PTMA DIY terjadi pembagian tugas pembinaan. Yakni Perpustakaan UMY bertugas membina perpustakaan sekolah Muhammadiyah DIY. Perpustakaan UAD bertugas melakukan pembinaan perpustakaan pedesaan melalui program KKN. Sedangkan Perpustakaan UNISA bertugas untuk membina perpustakaan persyarikatan dan perpustakaan tempat ibadah.

Demikian pula dengan kejuaraan nasional yang diraih Perpustakaan SMA MUHI Yogyakarta. Ternyata banyak perpustakaan Indonesia yang studi banding ke sana.

4. Kepercayaan dan kebanggaan warga lembaga (sekolah, PT, instansi)

Terakreditasinya prodi, sekolah, institusi, perpustakaan akan menumbuhkan kepercayaan bahkan kebanggaan tersendiri bagi warga suatu lembaga. Di suatu PTN DIY terdapat beberapa prodinya nilai B bahkan C. Saking bangganya dengan nilai A untuk perpustakaan, sang Ketua menceburkan diri di kolam renang. Hal ini menunjukkan kebanggaan pimpinan atas prestasi bawahannya.

5.Kepercayaan masyarakat umum

Masyarakat sekarang sudah mulai terbuka dan bisa memilih mana produk (barang atau jasa) yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Demikian pula dengan pemilihan lembaga pendidikan yang notabene perpustakaan terlibat di dalamnya.

Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa dengan adanya akreditasi akan menumbuhkan kepercayaan pada pimpinan lembaga (sekolah, PT, dll) dan masyarakat. Kalau pimpinan sudah percaya atas prestasi lembaga bawahannya, Insya Allah akan mendukung kegiatan dan penyediaan fasilitas perpustakaan.

Proses akreditasi

Beberapa langkah pengajuan akreditasi yang perlu dipahami:

1.Pengisian borang

Bagi perpustakaan yang akan mengajukan akreditasi sebaiknya mengisi borang yang sedang berlaku. Sebab borang ini selalu diperbaharui. Borang ini diisi data sejujurnya. Pengisian ini untuk mengetahui lebih awal kira-kira suatu perpustakaan itu layak atau berani diajukan atau tidak.

2.Penilaian awal

Borang yang telah diisi lengkap dikirim ke BPAD DIY untuk dinilai tim persiapan akreditasi. Untuk menjaga kualitas dan keistimewaan DIY, maka nilai awal ini harus 90 ke atas. Kalau masih agak jauh, kira-kira yang bersangkutan sanggup tidak menyediakan sarana pendukung. Sebaiknya tidak memaksakan diri. Toh tahun depan Insya Allah masih ada.

3.Penentuan lolos atau tidaknya

Setelah isian borang dinilai oleh tim persiapan lalu ditentukan apakah perpustakaan itu layak diajukan akreditasi atau ditunda. Proses ini sebenarnya untuk memperlancar akreditasi oleh asesor yang sebenarnya. Jangan sampai kita maju perang itu kalah dalam peperangan lantaran tidak memahami strategi perang. Akreditasi tahun 2016 menjadi pelajaran berharga.

4. Bimbingan

Bagi perpustakaan yang lolos dalam penilaian awal, lalu dilakukan pembinaan meliputi:

- a.Cara-cara melengkapi lampiran-lampiran; brosur, statistik, keuangan, foto, redokumentasi kegiatan, sertifikat dll.
- b. Penyiapan fisik; gedung, tata ruang, tata letak, penerangan, warna cat tembok, papan pengumuman, kamar kecil, dan lainnya.
- c.Penerimaan asesor

Kelancaran bimbingan tergantung keseriusan perpustakaan yang bersangkutan.

5. Pengisian borang yang sesungguhnya

Setelah persiapan dianggap baik, lalu data penyempurnaan borang diisi dan dikirim lengkap dengan lampiran-lampirannya. Borang ini sudah disusun rapi, dan sebaiknya belum/tidak dijilid. Sebab ada kemungkinan masih perlu tambahan data.

6. Penilaian.

Borang yang dianggap lengkap tadi, lalu dinilai oleh Tim Persiapan Akreditasi BPAD DIY. Dari hasil penilaian ini kemudian diberikan rekomendasi untuk diajukan akreditasi. Perpustakaan yang bersangkutan menunggu waktu untuk divisitasi Tim Asesor Perpustakaan Nasional RI.

7. Gladi resik

Sekitar 15 hari sebelum visitasi, dilakukan gladi resik di lapangan. Dalam hal ini panitia akreditasi sekolah menyiapkan borang, data, informasi, dan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

8. Visitasi

Hari, tanggal, jam visitasi, dan nama asesor akan diberitahukan oleh BPAD via SMS, WA, maupun surat resmi. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar perpustakaan yang akan diakreditasi menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan akreditasi.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Lasa Hs